

# Arah Kebijakan Program PPSP 2015-2019

Kick off Program PPSP 2015-2019  
Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas

Jakarta, 10 Maret 2015

# Universal Access Air Minum dan Sanitasi

Target RPJMN 2015-2019 -> tercapainya *universal access* atau cakupan akses 100% untuk air minum dan sanitasi – dalam rangka pengamanan air minum

	Air Minum	Sanitasi	
85% SPM	60 liter/orang/hari (Permen PU No. 14/2010)	Air Limbah	<ul style="list-style-type: none"><li>• 85% on-site system</li><li>• 15% off-site system</li></ul>
		Persampahan Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"><li>• 20% fasilitas reduksi sampah</li><li>• 80% penanganan sampah</li></ul>
15% Kebutuhan Dasar	15 liter/orang/hari	PHBS dan layanan sanitasi dasar untuk kawasan dengan tingkat kerawanan sanitasi rendah dan kawasan berkepadatan rendah	

# Nilai Strategis Universal Access Sanitasi

- Mencegah Rp 56T/tahun kerugian ekonomi
- Menghemat Rp 40T/tahun pengeluaran jika kondisi sanitasi baik
  - ✓ Pengurangan Rp 1,35 juta per KK/tahun belanja rumah tangga
  - ✓ Pengurangan hingga 94% angka diare
  - ✓ Peningkatan produktifitas
- *Global economic returns* US\$ 5,5/dolar yang diinvestasikan (WHO, 2012)

Penanganan Kawasan Kumuh

Peningkatan Kualitas Lingkungan

Peningkatan Derajat Kesehatan

Menurunkan Tingkat Kemiskinan

Penyediaan Sarana/Prasarana Dasar Permukiman

Pembentukan Modal Sosial di Masyarakat

# Modal Mencapai Universal Access

## Peraturan Presiden No. 185/2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

- Dasar Penganggaran
- Sustainability Pokja di Kab/Kota
- Diakuinya SSK, Roadmap Nasional/Provinsi

- Dokumen perencanaan sanitasi (444 SSK; 346-MPS/rencana investasi)
- Alokasi 1,2% APBD untuk pembangunan sanitasi
- Peningkatan koordinasi melalui Pokja Kab/Kota, Provinsi
- AKKOPSI – advokasi kebijakan

- ✓ Peningkatan dan pemantapan kualitas dokumen perencanaan
- ✓ Konsolidasi pendanaan dan peningkatan investasi
- ✓ Keberlanjutan dan pengembangan kelembagaan dan peraturan

# PPSP sebagai enabling environment mencapai UA

Kondisi Sanitasi eksisting  
2015

Universal Access 2019

## Roadmap PPSP 2015-2019



### Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

85%	Air Limbah	85% on-site system 15% off-site system
	Persampahan Perkotaan	20% fasilitas reduksi sampah 80% penanganan sampah
15%		PHBS dan layanan sanitasi dasar untuk kawasan dengan tingkat kerawanan sanitasi rendah dan kawasan berkepadatan rendah

Tahapan	Jumlah Kab/kota Sasaran				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kampanye, edukasi, advokasi dan pendampingan	135	106	58	62	
Penyusunan SSK	131	135	106	58	62
Implementasi	8	131	135	106	58
Monitoring dan Evaluasi	506	506	506	506	506



# Konversi target nasional ke target provinsi

## Target per Provinsi

## Target Nasional

### Dasar Perhitungan per Provinsi

Perhitungan target *bussines as usual* (BAU) → berdasarkan *baseline* akses sanitasi tahun 2014 dan tren kenaikan per tahun → target *adjusted* berdasarkan *effort factors*:

- Persentase penduduk perkotaan,
- Kapasitas fiskal provinsi
- Kondisi Pokja Provinsi
- Indeks Ketersediaan Air Baku (% desa rawan air)

### Faktor yang Dipertimbangkan

- Target Akses Sanitasi Layak di DKI Jakarta 100%
- Bila hasil *adjusted final* >100%, maka disesuaikan dengan nilai BAU
- *Effort factor* untuk
  - persentase penduduk perkotaan
  - kapasitas fiskal
  - kesulitan air lebih tinggi di Jawa dan Sumatera dibandingkan daerah lain dalam kelompok yang sama

# DISTRIBUSI TARGET PROVINSI - 2019

No	Provinsi	Baseline 2014 (Proyeksi dari 2010-2013)			Tren Akses Layak per Tahun (%) 2010-2013	Business As Usual 2019	Target 2019 (adjusted final)			Berapa kali tren BAU?	Tren Akses Layak per Tahun (%) 2010-2013	Tren Akses Layak per Tahun (%) 2015-2019
		Akses Layak	Akses Dasar	Tidak Ada Akses			Akses Layak	Akses Dasar	TOTAL			
1	Aceh	56.2%	8.8%	35.0%	2.8%	70.1%	83%	17.0%	100.0%	1.9	2.77%	5.4%
2	Sumatera Utara	63.5%	13.0%	23.4%	1.6%	71.5%	81%	19.0%	100.0%	2.2	1.60%	3.5%
3	Sumatera Barat	46.8%	2.5%	50.8%	0.6%	49.9%	57%	43.0%	100.0%	3.3	0.62%	2.0%
4	Riau	66.5%	13.4%	20.1%	3.1%	81.8%	95%	5.0%	100.0%	1.9	3.06%	5.7%
5	Jambi	60.7%	7.6%	31.7%	2.2%	71.6%	84%	16.0%	100.0%	2.1	2.18%	4.7%
6	Sumatera Selatan	54.1%	13.5%	32.4%	2.4%	66.2%	81%	19.0%	100.0%	2.2	2.43%	5.4%
7	Bengkulu	29.3%	7.8%	62.9%	0.8%	33.3%	39%	61.0%	100.0%	2.4	0.81%	1.9%
8	Lampung	46.5%	20.5%	32.9%	0.7%	49.9%	56%	44.0%	100.0%	2.8	0.67%	1.9%
9	Kep. Bangka Belitung	82.2%	1.0%	16.7%	4.3%	99.0%	93%	7.0%	100.0%	0.5	4.29%	2.2%
10	Kep. Riau	71.0%	4.7%	24.3%	0.6%	74.2%	81%	19.0%	100.0%	3.1	0.64%	2.0%
11	DKI Jakarta	87.2%	4.1%	8.7%	0.7%	90.6%	100%	0.0%	100.0%	3.8	0.67%	2.6%
12	Jawa Barat	61.7%	3.9%	34.4%	1.5%	69.4%	90%	10.0%	100.0%	3.7	1.54%	5.7%
13	Jawa Tengah	65.1%	7.6%	27.2%	1.8%	74.3%	91%	9.0%	100.0%	2.8	1.84%	5.2%
14	DIY	85.0%	6.9%	8.1%	0.8%	88.9%	92%	8.0%	100.0%	1.8	0.78%	1.4%
15	Jawa Timur	62.9%	13.8%	23.4%	2.5%	75.2%	91%	9.0%	100.0%	2.3	2.47%	5.6%
16	Banten	68.4%	2.4%	29.2%	1.2%	74.3%	89%	11.0%	100.0%	3.5	1.16%	4.1%
17	Bali	85.1%	0.0%	14.9%	1.5%	92.6%	95%	5.0%	100.0%	1.3	1.50%	2.0%
18	Nusa Tenggara Barat	54.7%	4.5%	40.8%	1.8%	63.8%	75%	25.0%	100.0%	2.2	1.82%	4.1%
19	Nusa Tenggara Timu	29.7%	33.0%	37.3%	0.9%	34.0%	40%	60.0%	100.0%	2.4	0.86%	2.1%
20	Kalimantan Barat	54.4%	6.2%	39.5%	2.3%	65.6%	76%	24.0%	100.0%	1.9	2.26%	4.3%
21	Kalimantan Tengah	47.0%	5.5%	47.5%	3.0%	61.9%	76%	24.0%	100.0%	2.0	2.97%	5.8%
22	Kalimantan Selatan	60.4%	3.0%	36.6%	2.9%	74.7%	87%	13.0%	100.0%	1.9	2.87%	5.3%
23	Kalimantan Timur	78.5%	6.0%	15.6%	2.5%	91.0%	93%	7.0%	100.0%	1.2	2.52%	2.9%
24	Sulawesi Utara	74.7%	2.7%	22.5%	2.4%	86.9%	95%	5.0%	100.0%	1.7	2.43%	4.1%
25	Sulawesi Tengah	56.2%	4.2%	39.6%	2.0%	66.1%	77%	23.0%	100.0%	2.1	1.99%	4.2%
26	Sulawesi Selatan	72.2%	7.4%	20.4%	2.7%	85.6%	93%	7.0%	100.0%	1.5	2.69%	4.2%
27	Sulawesi Tenggara	62.0%	9.6%	28.4%	2.8%	76.0%	86%	14.0%	100.0%	1.7	2.79%	4.8%
28	Gorontalo	55.0%	1.1%	43.8%	2.3%	66.8%	75%	25.0%	100.0%	1.7	2.34%	4.0%
29	Sulawesi Barat	48.1%	5.5%	46.4%	1.7%	56.7%	64%	36.0%	100.0%	1.9	1.71%	3.2%
30	Maluku	67.1%	2.1%	30.8%	4.7%	90.6%	91%	9.0%	100.0%	1.0	4.70%	4.8%
31	Maluku Utara	59.2%	0.4%	40.4%	1.5%	66.7%	75%	25.0%	100.0%	2.1	1.49%	3.2%
32	Papua Barat	49.4%	11.1%	39.5%	0.3%	51.1%	55%	45.0%	100.0%	3.3	0.34%	1.1%
33	Papua	29.2%	25.1%	45.7%	1.3%	35.7%	43%	57.0%	100.0%	2.1	1.31%	2.8%

# Nilai Strategis Universal Access

**Rp 273 T**

Kebutuhan investasi pembangunan sanitasi untuk memenuhi *universal access* 2015-2019

**Rp 72 T**

Kebutuhan investasi pembangunan sanitasi 201 kab/kota periode 2012-2017 (Nawasis)

**Rp 1,55 T**

Alokasi pendanaan sanitasi di 71 kab/kota tahun 2010 -2013 (Nawasis)

**Investasi pembangunan sanitasi mencapai  
Rp 19.096 per kapita**

(Data NAWASIS 2010-2013 dari 76 kabupaten/kota di 16 provinsi)



Terima Kasih